

SENTRALISASI PENDIDIKAN DAN DESENTRALISASI

Silfi Ghifari¹, Siti Nurdiana², Ananda Pazila³, Rizki Ananda⁴, Nasrul⁵
Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai^{1,2,3,4,5}
silvighifary@gmail.com¹,
sitinurdiana1213@gmail.com², anandapazila637@gmail.com³,
rizkiananda@universitaspahlawan.ac.id⁴, aseanaguhy@gmail.com⁵

ABSTRACT

This research investigates the centralization of education and decentralization. Using a literature review method, this research seeks to examine the correlation between scientific journals in the selected discourse. In the field of education management, there are two different regulatory frameworks: centralization and decentralization systems. In a centralized system, all aspects of education delivery are closely supervised by the central government. In contrast, in a decentralized system, regulatory power is delegated to local governments. In reality, these systems are often applied on a spectrum, with responsibilities and authority shared between central and local institutions. Decentralization of education will empower educational leaders to strategically foster and advance their respective regions, thereby promoting optimal growth and development.

Keywords: centralization, education, decentralization

ABSTRAK

Penelitian ini menyelidiki tentang sentralisasi pendidikan dan desentralisasi, Metode penelitian ini menggunakan kajian pustaka, penelitian ini berupaya untuk meneliti korelasi antara jurnal ilmiah dalam wacana yang dipilih. Dalam bidang manajemen pendidikan, terdapat dua kerangka peraturan yang berbeda: sistem sentralisasi dan desentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan diawasi secara ketat oleh pemerintah pusat. Sebaliknya, dalam sistem desentralisasi, kekuasaan pengaturan dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Pada kenyataannya, sistem ini sering kali diterapkan pada suatu spektrum, dengan tanggung jawab dan wewenang dibagi antara lembaga pusat dan daerah. Desentralisasi pendidikan akan memberdayakan para pemimpin pendidikan untuk secara strategis membina dan memajukan daerahnya masing-masing, sehingga mendorong pertumbuhan dan pembangunan yang optimal.

Kata Kunci: sentralisasi, pendidikan, desentralisasi

A. Pendahuluan

Diakui secara luas bahwa pendidikan dasar mencakup kurikulum sembilan tahun, yang terdiri dari program Sekolah Dasar enam tahun yang diikuti oleh tiga tahun di tingkat sekolah menengah, serupa dengan sekolah menengah pertama. Tujuan utama pendidikan dasar adalah untuk membekali siswa dengan keterampilan penting yang diperlukan untuk pertumbuhan pribadi, integrasi masyarakat, kewarganegaraan, dan partisipasi global, sehingga mempersiapkan mereka untuk mengejar prestasi akademis lebih lanjut di pendidikan menengah (Shodiq, 2022).

Pendidikan terpusat telah dikritik karena mengikis prinsip-prinsip demokrasi, sehingga menyebabkan munculnya desentralisasi sebagai solusi atas kekurangan-kekurangan tersebut. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengembangkan pendidikan secara demokratis dan suportif. Pergeseran pengelolaan pendidikan dari sentralisasi ke desentralisasi menandakan adanya perubahan signifikan dalam sistem pendidikan (Chan & Tuti 2010).

Implementasi UU No. 32 Tahun 2004 memberikan peluang dan tantangan unik bagi penyelenggara pendidikan di daerah otonom untuk secara inovatif meningkatkan pengembangan di sekolah dasar (Juhaeni, 2018).

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, tantangan dan permasalahan mulai bermunculan. Kurangnya sumber daya manusia sering disebut-sebut sebagai penyebab utama permasalahan ini. Hal ini terutama terlihat pada sektor pendidikan, dimana perbedaan pendapat dan cara pandang di berbagai daerah menyebabkan munculnya kelebihan dan kekurangan di ranah publik.

Oleh karena itu, paradigma pembangunan pendidikan di Indonesia saat ini harus mengalami transformasi sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang. Pergeseran menuju desentralisasi, dengan fokus pada pendidikan berbasis masyarakat, menunjukkan perubahan pendekatan yang signifikan. Dengan menerapkan pendidikan berbasis komunitas, kita mempunyai peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memenuhi kebutuhan spesifik

setiap daerah berdasarkan sumber daya unik mereka. Pendekatan ini tidak hanya mendorong kemajuan tetapi juga memastikan bahwa pendidikan selaras dengan realitas dan sumber daya masyarakat (Setyaningsih, 2017).

B. Metode Penelitian

Artikel ini dengan elegan menggali berbagai sudut pandang seputar permasalahan yang kontroversial, skenario yang rumit, dan kebijakan yang kontroversial. Melalui analisis kajian pustaka yang cermat, penelitian ini berupaya untuk meneliti korelasi antara jurnal ilmiah dalam wacana yang dipilih, menawarkan pemeriksaan yang bernuansa dan disengaja. Proses metodologisnya meliputi pemilihan artikel, pengumpulan data awal, navigasi rintangan, pengumpulan data tambahan, dan berpuncak pada perumusan kesimpulan dan rekomendasi yang mendalam.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sentralisasi Pendidikan

Sentralisasi melibatkan administrasi Negara dan pemerintahan yang terpusat (Amtu,

2013). Gagasan sentralisasi mengabaikan pentingnya kontribusi lokal dan menghambat semangat inovatif daerah. Sebaliknya, desentralisasi mendorong persaingan yang sehat dan memungkinkan pertumbuhan yang mandiri (Abdurrahmansyah, 2005). Kewenangan pemerintah pusat di bidang pendidikan dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2000. Meskipun pada akhirnya menjadi tanggung jawab daerah dan sekolah untuk membiayai pendidikan di wilayah mereka, hal ini merupakan investasi yang mulia bagi masa depan masyarakat kita.

Sentralisasi berarti konsolidasi kewenangan di pusat pemerintahan. Daerah mengandalkan arahan dari pusat untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan undang-undang. Pendekatan manajemen ini memusatkan kekuasaan di tangan beberapa individu terpilih di puncak hierarki organisasi. Secara historis, sentralisasi sudah lazim dalam operasional pemerintahan sebelum munculnya otonomi daerah. Namun, kelemahan sistem ini terletak pada lambatnya proses pengambilan keputusan, karena kebijakan dan keputusan daerah ditentukan oleh

pejabat pemerintah pusat. Akibatnya, hal ini dapat mengakibatkan kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai dan kebutuhan daerah tertentu.

Indonesia, sebagai negara yang sedang mengalami pertumbuhan dan kemajuan, memiliki banyak kesamaan dengan negara-negara berkembang lainnya. Ciri-ciri sosio-kulturalnya berakar pada sistem terpusat yang sudah lama ada dan merupakan ciri khas negara-negara berkembang. Hal ini menyebabkan pendekatan pendidikan di Indonesia menjadi terstandarisasi, dengan keputusan yang diambil dari atas ke bawah, sehingga menghasilkan kurikulum yang seragam dan mungkin tidak selalu mempertimbangkan kebutuhan individu dan konteks siswa.

Akibatnya, siswa sering kali diperlakukan sebagai objek belaka, sehingga membatasi kesempatan mereka untuk mengembangkan kreativitas dan mengembangkan bakat individu. Sentralisasi pendidikan telah menimbulkan fenomena yang memprihatinkan, antara lain pemerintahan yang totaliter, keseragaman pola manajemen dan budaya,

menurunnya keberagaman daerah, serta hilangnya inisiatif dan kreativitas manusia.

Oleh karena itu, pentingnya sistem pendidikan terpusat tidak dapat dilebih-lebihkan. Sangat penting untuk mengupayakan pendidikan yang membina individu yang mampu berpikir mandiri, memecahkan masalah secara efektif, dan berkolaborasi secara kreatif. Individu-individu ini harus memiliki keterampilan interpersonal dan empati yang diperlukan untuk berkembang dalam lingkungan komunitas. Pencapaian visi ini mungkin menimbulkan tantangan, namun hal ini penting untuk menciptakan masyarakat yang berdaya dan inovatif.

Dedikasi terhadap kemajuan bimbingan belajar, khususnya di bidang pendidikan, merupakan ikhtiar yang sangat penting dalam membentuk pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan adalah kunci untuk membina individu yang mampu menghadapi tantangan masa depan global, dan untuk menumbuhkan masyarakat dan budaya di Indonesia yang progresif, mandiri, dan mudah beradaptasi. Terlepas dari tantangan yang ada,

upaya untuk mendorong keadilan dan perencanaan strategis dalam pendidikan terus dilakukan. Tuntutan akan pendidikan berkualitas tinggi menggarisbawahi pentingnya sekolah dalam menumbuhkan lingkungan belajar yang positif dan memberikan hasil pendidikan yang luar biasa. Namun, tidak semua sekolah mampu menyelenggarakan pendidikan berkualitas tersebut. Sekolah yang memprioritaskan keunggulan dalam praktik pendidikannya akan lebih siap untuk memenuhi beragam kebutuhan siswanya (Maryani, et al., 2023).

Transisi dari sistem manajemen pendidikan sentralisasi ke desentralisasi mencerminkan pergeseran menuju peningkatan otonomi dan akuntabilitas melalui penerapan prinsip-prinsip MBM. Dengan memberdayakan pimpinan sekolah, guru, siswa, dan orang tua dengan otoritas pengambilan keputusan, kami bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mendorong lingkungan pendidikan yang lebih kolaboratif dan inklusif. Transformasi ini memungkinkan keterlibatan yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan dan tanggung jawab bersama dalam

alokasi sumber daya dan manajemen personalia.

Desentralisasi Pendidikan

Desentralisasi mencerminkan esensi kebebasan dan pemberdayaan (Yahya, 2012), karena melibatkan pembagian wewenang dan otonomi kepada daerah (Hasbullah, 2006). Menciptakan lingkungan yang mendorong tumbuhnya dan eksplorasi ide-ide inovatif di setiap satuan pendidikan, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan (Chan & Tuti 2010). Konsep desentralisasi dalam manajemen pendidikan melibatkan pengalihan kekuasaan pengambilan keputusan dari otoritas pusat ke daerah dalam kerangka sistem pendidikan nasional (Bahtiar Irinato, 2011).

Konsep desentralisasi pendidikan yang diusung Toha mewakili pendekatan canggih untuk mengalihkan kewenangan di bidang pendidikan dari badan terpusat ke unit atau pejabat di tingkat lebih rendah, seperti perwakilan daerah atau masyarakat. Pergeseran ke arah otonomi dalam administrasi pendidikan ini merupakan contoh dari gerakan yang lebih luas menuju

desentralisasi tata kelola di bidang pendidikan (Marpaung, 2018).

Konsep desentralisasi berarti mempercayakan kewenangan pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah, dibandingkan mempertahankan sistem yang terpusat. Di bidang pendidikan, peralihan ke sistem regional atau otonom memungkinkan adanya fleksibilitas dan pemberdayaan yang lebih besar di tingkat lokal. Meskipun pendekatan ini memungkinkan daerah mengambil keputusan secara mandiri, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Penerapan konsep Desentralisasi Berbasis Masyarakat dalam bidang pendidikan bukan sekedar usulan, namun merupakan sebuah evolusi yang diperlukan dalam kewenangan internal pemerintahan. Pergeseran ini mencakup hal-hal yang tidak berada dalam peraturan pemerintah pusat, yang dengan sendirinya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan

pendidikan. Desentralisasi ini melibatkan pelimpahan kewenangan pengelolaan pendidikan kepada daerah otonom, dengan kabupaten atau kota sebagai garda depan desentralisasi. Pendekatan yang elegan dan persuasif ini memungkinkan terciptanya sistem tata kelola pendidikan yang lebih efektif dan responsif.

Desentralisasi di Indonesia memiliki sejarah yang kaya sejak tahun 1973 dengan diberlakukannya berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk UU No. 5 Tahun 1973, PP No. 45 Tahun 1992, dan PP No. 8 Tahun 1995. Konsep desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam UU No. 22 melibatkan pengalihan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada daerah otonom. Di era reformasi saat ini, Indonesia berkomitmen untuk menerapkan kebijakan otonomi menyeluruh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Otonomi daerah berarti penyerahan kekuasaan secara baik-baik dari pemerintah pusat ke berbagai daerah, yang mencakup kewenangan di bidang-bidang utama seperti pendidikan.

Ada beberapa alasan kuat untuk mempertimbangkan desentralisasi sebagai langkah yang perlu. Pertama, memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari seluruh lapisan masyarakat. Kedua, sejalan dengan prinsip demokrasi. Ketiga, hal ini mengurangi biaya yang terkait dengan proses birokrasi yang panjang, yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan efisiensi. Selain itu, desentralisasi memberikan peluang untuk memanfaatkan sumber daya daerah secara maksimal. Hal ini juga mengakomodasi berbagai kepentingan politik dan mendorong peningkatan kualitas produk sehingga menjadikan dunia usaha lebih kompetitif.

Sebagaimana dikemukakan oleh H.A.R Tialar pada tahun 2002, ada tiga aspek krusial yang perlu diperhatikan ketika membahas perlunya desentralisasi pendidikan. Pertama, peningkatan pembangunan masyarakat dan demokrasi, yang juga dikenal sebagai masyarakat sipil, memainkan peran penting dalam menegakkan hak asasi manusia dan membangun masyarakat berdasarkan kebebasan dan tanggung jawab. Masyarakat

demokratis memerlukan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, yang dikenal sebagai pemerintahan Madani, yang dipilih oleh dan untuk rakyat. Kedua, pengembangan modal sosial, sebagaimana ditekankan oleh ekonom seperti Amartya Sen, sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan masyarakat yang lebih manusiawi. Hal ini hanya dapat dicapai melalui proses pendidikan yang menanamkan nilai-nilai demokrasi dan mendorong pemikiran kritis. Terakhir, peningkatan daya saing bangsa merupakan hal yang krusial dalam dunia global saat ini. Masyarakat yang menghargai kerja sama dan daya saing internal akan berkembang, sementara masyarakat otoriter akan tertinggal. Desentralisasi pendidikan sangat penting untuk memberdayakan individu dan komunitas dalam membangun modal sosial yang kuat dan meningkatkan daya saing mereka dalam skala global (Tialar, 2002).

Sementara itu, sebagaimana diuraikan Dwiyanto (2005: 49-50), pemerintah pusat menerapkan desentralisasi kepada pemerintah daerah karena berbagai alasan. Secara politis, hal ini bertujuan untuk

memajukan kepentingan regional dan mendorong proses demokrasi di tingkat akar rumput untuk mendukung politik dan kebijakan nasional. Dari sudut pandang manajemen, desentralisasi dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas publik. Secara budaya, desentralisasi berupaya untuk mengakui karakteristik unik dan keunggulan masing-masing daerah, termasuk geografi, dinamika kependudukan, ekonomi, dan budaya. Pada akhirnya, desentralisasi pembangunan memfasilitasi perumusan dan pelaksanaan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan lebih lancar. Selain itu, desentralisasi mengatasi kelemahan pemerintah pusat dalam memantau dan mengawasi inisiatif-inisiatifnya (Setyaningsih, 2017).

Desentralisasi pendidikan mendorong penanaman kemandirian dalam mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan pendidikan yang unik di setiap daerah, sehingga mendorong pertumbuhan dan kemajuan yang berkelanjutan. Dengan memanfaatkan kekuatan perubahan dan pembangunan, pendekatan ini memprioritaskan kesejahteraan masyarakat lokal

dengan memberdayakan mereka untuk memanfaatkan sumber daya alam dan manusia secara efektif.

Yatimin (2009: 44) mengemukakan bahwa desentralisasi pendidikan menawarkan peluang unik untuk meningkatkan potensi lokal. Pendekatan ini memungkinkan adanya adaptasi cepat terhadap kebutuhan spesifik masing-masing daerah, mendorong proses birokrasi yang praktis dan fleksibel, mendorong inisiatif independen dari pemerintah daerah, memungkinkan daerah menentukan nasibnya sendiri berdasarkan peraturan daerah, dan menghambat tradisi seremonial yang tidak bermakna (Yatimin, 2009).

Di era persaingan global yang ketat saat ini, pendidikan telah mengalihkan fokusnya untuk menekankan kompetensi. Hal ini mengacu pada konsep pendidikan holistik, yang mencakup semua kegiatan yang memberikan siswa pengalaman belajar di bawah bimbingan pengaruh internal dan eksternal. Dalam pendidikan berbasis kompetensi, semua mata pelajaran diharuskan mencerminkan penerapan dunia nyata, dengan mempertimbangkan kompetensi individu siswa dan memasukkan

unsur budaya lokal dan global. Pendekatan ini memastikan bahwa pendidikan bukan sekedar menyajikan informasi, namun juga membekali siswa dengan keterampilan praktis seumur hidup. Pendidikan berbasis kompetensi ditandai dengan penekanannya pada prestasi individu, hasil pembelajaran, metode pengajaran yang beragam, dan fokus pada proses dan hasil pembelajaran mendalam. Model pendidikan ini harus disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam masyarakat yang didorong oleh persaingan, inovasi, dan kreativitas. Pendidikan tidak lagi cukup hanya mencakup materi pelajaran yang kompleks; hal ini juga harus memberdayakan individu untuk berkembang dalam dunia yang kompetitif dengan memanfaatkan sumber daya mereka sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa desentralisasi pendidikan berfungsi sebagai model manajemen yang memberdayakan sekolah dalam proses pengambilan keputusan, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pendidikan dan menumbuhkan profesionalisme guru. Namun, tujuan sebenarnya dari desentralisasi tidak

hanya terbatas pada institusi pendidikan saja, namun juga mencakup dampak sosial yang lebih luas. Sekolah diharapkan berkontribusi aktif terhadap pembangunan komunitas dan wilayahnya, beradaptasi dengan dinamika budaya, geografis, dan sosial setempat, namun tetap selaras dengan tujuan pendidikan nasional.

D. Kesimpulan

Sentralisasi adalah praktik yang halus dalam mengatur negara dan mengelola operasional pemerintahan dari lokasi terpusat, memastikan bahwa semua fungsi, tugas, dan wewenang negara secara eksklusif ditangani oleh entitas pemerintah pusat. Oleh karena itu, pentingnya sistem pendidikan terpusat tidak dapat dilebih-lebihkan. Sangat penting untuk mengupayakan pendidikan yang membina individu yang mampu berpikir mandiri, memecahkan masalah secara efektif, dan berkolaborasi secara kreatif. Individu-individu ini harus memiliki keterampilan interpersonal dan empati yang diperlukan untuk berkembang dalam lingkungan komunitas. Pencapaian visi ini mungkin menimbulkan tantangan,

namun hal ini penting untuk menciptakan masyarakat yang berdaya dan inovatif.

Desentralisasi pendidikan mendorong penanaman kemandirian dalam mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan pendidikan yang unik di setiap daerah, sehingga mendorong pertumbuhan dan kemajuan yang berkelanjutan. Dengan memanfaatkan kekuatan perubahan dan pembangunan, pendekatan ini memprioritaskan kesejahteraan masyarakat lokal dengan memberdayakan mereka untuk memanfaatkan sumber daya alam dan manusia secara efektif. Pentingnya desentralisasi pendidikan tidak dapat dilebih-lebihkan dalam upaya kita untuk segera menjembatani kesenjangan dengan negara lain. Penerapan pendekatan demokratis dalam pendidikan akan menghasilkan masyarakat yang cerdas dan bertanggung jawab. Hal ini pada gilirannya akan menumbuhkan tumbuhnya masyarakat sipil yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan menjunjung tinggi kesucian hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmansyah. 2005. Wacana Pendidikan Islam: Khazanah Filosofis dan Implementasi Kurikulum, Metodologi dan Tantangan Pendidikan Moralitas, Yogyakarta: Global Pustaka.
- Amtu, Onisimus. 2013. Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Konsep, Strategi dan Implementasi, Bandung: Alfabeta.
- Bahtiar Irinato, Yoyon. 2011. Kebijakan Pembaruan Pendidikan: Konsep, Teori, Model, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Hasbullah. 2006. Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- H A R. Tialar. 2002. Membenahi Pendidikan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Chan, Sam & Tuti T. Sam. 2010. Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah, Jakarta: Rajawali Pers.
- Yahya, Nur. 2012. Analisis Kebijakan Pendidikan Islam, Yogyakarta: Idea Press.
- Juhaeni, J. (2018). Sentralisasi dan Desentralisasi Dalam Manajemen Madrasah Ibtidaiyah. *Journal of Islamic Elementary School (JIES)*, 3(2), 34-38.
- Maryani, D., Harsono, H., & Suyatmini, S. (2023). Implementasi Sentralisasi Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Dasar Surakarta. *Attractive: Innovative Education Journal*, 5(3), 242-248.
- Marpaung, T. (2018). DESENTRALISASI PENGELOLAAN PENDIDIKAN. *Benchmarking-Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 89-99.

- Shodiq, A. (2022). Manajemen Pendidikan Dasar: Apakah Sistem Sentralisasi Ataukah Desentralisasi: Suatu Kajian SD al-Anwar Kota Pasuruan. *Tarbawi: Jurnal Studi Pendidikan Islami*, 10(1), 1-9.
- Setyaningsih, K. (2017). Esensi tranformasi sistem sentralisasi-desentralisasi pendidikan dalam pembangunan masyarakat. *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 76-94.
- Yatimin. 2009. Desentralisasi Pendidikan Islam : Studi Konsep Dalam Pengembangan Kbk Dan Kbs. *Hikmah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 1.